

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Pembangunan merupakan salah satu pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu proses multidimensional yang menyangkut perubahan dasar pada struktur ekonomi, sosial, lembaga nasional dan sikap masyarakat di samping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2015). Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur secara makro dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan total output (barang dan jasa) yang diproduksi oleh suatu negara dibandingkan dari satu periode waktu ke periode lainnya.

Berbagai sektor dalam perekonomian mendorong proses terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Sektor keuangan menduduki peran yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit. Sektor keuangan menawarkan untuk para debitor berbagai jenis instrumen keuangan dengan resiko rendah dan kualitas terbaik. Sehingga investasi akan bertambah dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997; Fritzer, 2004 dan Kularatne, 2002).

Dibalik peran sektor keuangan yang begitu baik bagi perekonomian pada kenyataannya belum dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Data yang dikeluarkan oleh World Bank (2017) mencatat pada tahun 2017 masih terdapat 1,7 miliar penduduk usia kerja yang belum terjangkau oleh sektor keuangan formal atau *unbanked*. Mereka pada umumnya berada dikelompok masyarakat miskin, berpendidikan rendah dan bekerja di luar sektor formal. Tidak adanya akses ke sektor keuangan formal pada akhirnya mereka harus mengandalkan cara pengelolaan uang

secara informal, seperti menyimpan uang di rumah, meminjam uang kepada rentenir, keluarga dan pialang uang. Terkadang alternatif tersebut berisiko, mahal, tidak mencukupi, dan tidak dapat diprediksi.

Saat ini inklusi keuangan menjadi fokus kebijakan oleh berbagai negara tak terkecuali Indonesia, untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Dalam arti yang lebih luas, inklusi keuangan diartikan sebagai proses yang membawa berbagai lapisan masyarakat di bawah satu atap sistem keuangan, terutama orang-orang yang berpenghasilan sangat rendah, kelompok miskin dan terpinggirkan yang membuat mereka bisa mengakses produk dan jasa keuangan formal (Sethi dan Acharya, 2018). Sedangkan World Bank (2014) mendefinisikan Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk dapat memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan formal yang terjangkau dan bermanfaat, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti pembayaran, transaksi, kredit, tabungan, dan asuransi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2019) mencatat bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 76,19 persen. Berdasarkan strata wilayah, untuk wilayah perkotaan indeks inklusi keuangan adalah sebesar 83,60 persen, dan untuk wilayah perdesaan adalah sebesar 68,49 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 dan 2013 yaitu sebesar 67,8 persen dan 54,74 persen. Maka dalam enam tahun terakhir terdapat peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 21,25 persen.

Sedangkan disisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019) laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia diukur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 6,19 persen dan pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02 persen, artinya dalam kurun waktu 8 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebesar 1,17 persen. Dengan demikian, tingginya indeks inklusi keuangan di Indonesia tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada tingkat ekonomi makro, beberapa studi empiris telah membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Subrahmanyam dan Acharya (2017) secara implisit menyatakan bahwa inklusi keuangan jelas dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat karena akses yang lebih besar ke kredit formal. Sarma (2012) menyatakan bahwa peningkatan jasa keuangan akan mendorong tabungan baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Lalu peningkatan tabungan ini akan mendorong peningkatan investasi sektor modal. Peningkatan tersebut yang akhirnya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2012) ketersediaan jasa perbankan dan penggunaan jasa perbankan dapat digunakan sebagai tolak ukur kondisi inklusi keuangan disuatu wilayah. Di negara berkembang termasuk Indonesia, sub sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran paling besar di dalam sektor keuangan. Sehingga, Indikator perbankan digunakan untuk melihat kondisi inklusi keuangan suatu wilayah. Ketersediaan jasa perbankan (*availability*) berkaitan dengan infrastruktur layanan perbankan yang tersedia untuk masyarakat. Untuk melihat sejauh mana ketersediaan jasa perbankan, indikator yang dipakai adalah jumlah kantor cabang bank dan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang tersedia pada suatu wilayah. Sedangkan, penggunaan jasa perbankan (*usage*) berguna untuk melihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan jasa perbankan. Jumlah kredit pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikator yang digunakan dalam penggunaan layanan keuangan. Sehingga dalam penelitian ini indikator inklusi keuangan yang digunakan adalah jumlah kantor cabang, jumlah ATM, dan rasio kredit perbankan.

Maka dari itu, akses produk dan jasa perbankan yang mudah bagi kelompok masyarakat dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kelas bawah sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah ini dapat menambah pendapatan mereka yang pada akhirnya secara aggregate dapat meningkatkan PDB nasional. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan produk domestik bruto daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kondisi inklusi keuangan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sebanyak 76,19 persen masyarakat Indonesia telah dinyatakan memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal pada tahun 2019. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami penurunan, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 6,19 dan turun menjadi 5,02 pada tahun 2019. Sedangkan menurut para ahli inklusi keuangan yang tinggi pada suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Maka dari itu timbulnya pertanyaan terkait bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih dalam mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hubungan inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.